

# KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RACHMAD BERLIAN

NPP 30.0284

Asdaf Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau

Prodi Politik Indonesia Terapan

Email. ramadberlian@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs Hyronimus Rowa, M.Si

## ABSTRAK

**Problem/Background (GAP):** *The performance of the national and political unitary bodies in improving political education for the people of Tanjung Pinang City is still very far from good, political education is very important and cannot be considered as something to be taken aside.*  
**Purpose:** *To find out what efforts and factors are inhibiting the implementation of increasing political education in the city of Tanjung Pinang.* **Method:** *qualitative approach with descriptive research method. The theory that researchers use in this paper uses the performance theory put forward by Agus Dwiyanto with indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability.* **Results and Findings:** *the performance of the National Unity and Politics Agency of Tanjung Pinang City is still not optimal, this can be seen from: the productivity of the apparatus productivity level is still not working effectively and efficiently, the quality of service to the community has been carried out properly, the responsiveness of the Kesbangpol performance itself has not been able to recognizing the needs of the local community, the accountability of the national unity agency and politics is good by implementing activity reports in accordance with the policies set by the leadership in terms of responsibility by the national unity agency and politics is still not good, this is because there are still many programs that have not been implemented properly The supporting factors are very high work motivation, the work environment in the national unitary body and politics among employees interact well with each other. The inhibiting factors are the lack of apparatus work facilities, the lack of expertise or abilities of the apparatus, the lack of community participation. efforts made by the performance of national and political unitary bodies to deal with existing obstacles, namely: internal efforts are to increase work facilities, provide training and education for apparatus external efforts are to invite the public to support programs, provide outreach programs, especially political education.* **Conclusion:** *the Kesbangpol apparatus itself is still not optimal because it has not been able to meet the needs of the community and the apparatus is still not working effectively and efficiently because of the lack of expertise and abilities possessed by the apparatus and the lack of public participation in awareness of the importance of politics and considering politics is something that is not important for them in this modern age.*

**Keywords:** *Political Education, Society, Performance, Effective and Efficient*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Kinerja badan kesatuan bangsa dan politik dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat di kota Tanjung Pinang masih sangat jauh dari kata baik, pendidikan politik itu sangat penting dan tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang di kesampingan. **Tujuan :** Untuk mengetahui upaya dan faktor apa saja yang penghambat dalam melaksanakan peningkatan pendidikan politik di kota Tanjung Pinang. **Metode:** pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teori yang peneliti gunakan dalam penulisan ini menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dengan indikator produktifitas, kualitas layanan, responvisitas, responbilitas dan akuntabilitas. **Hasil dan Temuan :** kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang masih belum optimal hal ini tampak dari : produktivitas dari tingkat produktivitas aparatur masih belum bekerja dengan efektif dan efisien, kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah dijalankan dengan baik, responsivitas sendiri dari kinerja kesbangpol belum mampu mengenali kebutuhan masyarakat setempat, akuntabilitas badan kesatuan bangsa dan politik sudah baik dengan menerapkan laporan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan segi responbilitas oleh badan kesatuan bangsa dan politik masih kurang baik, hal ini karena dari program masih banyak program yang belum terlaksana dengan baik .Faktor pendukung adalah motivasi kerja yang sangat tinggi, lingkungan kerja yang ada di badan kesatuan bangsa dan politik antar sesama pegawai nya saling berinteraksi dengan baik. Faktor penghambat adalah kurangnya fasilitas kerja aparatur, kurangnya keahlian atau kemampuan yang dimiliki aparatur ,kurangnya partisipasi masyarakat . upaya yang dilakukan oleh kinerja badan kesatuan bangsa dan politik untuk menghadapi hambatan yang ada yaitu : upaya internal adalah menambah fasilitas kerja, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur upaya eksternal adalah mengajak masyarakat untuk mendukung program, memberikan program sosialisasi khususnya pendidikan politik. **Kesimpulan :** aparatur badan kesbangpol sendiri masih belum optimal karna belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur masih belum bekerja secara efektif dan efisien karna kurangnya keahlian dan kemampuan yang dimiliki aparatur serta kurangnya partisipasi masyarakat akan kesadaran penting nya politik dan menganggap politik adalah hal yang tidak penting bagi mereka di zaman yang modern ini.

**Kata kunci :** Pendidikan politik, Masyarakat, Kinerja, Efektif dan Efisien

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik dapat dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dan perlu berkesinambungan agar pemahaman pendidikan politik lebih berkembang dan maju. Pengembangan pendidikan politik bangsa Indonesia merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa, urgensi pendidikan politik memang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan ini menjadi tugas negara untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan wujud upaya pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah.

Ketidakhadiran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik akan berdampak pada pasang-surutnya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Tanjung Pinang, masyarakat diajar untuk menyuap, dididik untuk melakukan kecurangan dan melakukan pembohongan publik dengan cara manipulasi data yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan para elite politik. Masyarakat juga dididik untuk berseteru dan berkonflik sesamanya dengan melancarkan politik identitas (suku, agama, tokoh). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan gubernur Kepulauan Riau nomor 92 tahun 2021 memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pendidikan politik dimasyarakat Kepulauan Riau khususnya kota Tanjung Pinang. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat kota Tanjung Pinang dalam pemilu tahun 2020 kemarin menunjukkan peran besar dari badan kesatuan bangsa dan politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kota Tanjung Pinang.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyadari pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam memberikan pendidikan politik dan kesadaran politik kepada seluruh masyarakat di Kota Tanjung Pinang, serta merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam bidang pembangunan politik.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada 3 (tiga) permasalahan utama dalam kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kota Tanjung Pinang yakni kurangnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabel, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan politik, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kinerja aparatur dan pendidikan politik. Penelitian pertama dilakukan oleh Iko Deswanda, 2018, dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas. Hasil Penelitian, yakni 1). Peran Pemerintah Selaku Pelopor. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bergerak masif untuk menjalankan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. 2). Peran Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri Pesan sebagai pelaksana sendiri adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Azfina Juryara, 2015, dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau. Hasil Penelitian, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu badan pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada bidang pemberdayaan belum melaksanakan fungsinya secara maksimal khususnya pada bidang pembinaan wawasan kebangsaan. Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat, 2021, dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Hasil Penelitian, yakni Bakesbangpol Provinsi NTB

melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri, melakukan kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan pilkada serta penyelesaian masalah dalam pilkada kepada gubernur, menciptakan konduktifitas daerah dalam penyelenggaraan pilkada 2018.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus penelitiannya di aceh utara sedangkan Iko Deswanda locus penelitiannya di Manado. Azfina Juryara locus penelitiannya di Kepulauan Riau. Rahmad Hidayat locus penelitiannya di Provinsi NTB.

#### **1.5 Tujuan**

Untuk mengetahui upaya dan faktor apa saja yang penghambat dalam melaksanakan peningkatan pendidikan politik di kota Tanjung Pinang.

### **II. METODE**

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu adadah pendekatan kualitatif. Metode yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. analisis penelitian ini menggunakan Teori kinerja dwiyanto (2012:98) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dengan informan sebagai berikut Kepala badan kesbangpol, Sekretaris badan, Kepala bidang politik dan kemasyarakatan, Sub bidang politik dan pemilu masing masing 1 orang, dan Masyarakat 6 orang. Dalam penelitian kuantitatif peneliti itu sendiri adalah sebagai instrumen pengumpul data yang utama.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur. Peneliti memperoleh dokumen pada penelitian ini melalui Peraturan Perundt ang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, dokumen-dokumen, arsip dan bahan tainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber literatur dalam mendukung penelitian ini. Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kota Tanjung Pinang**

Dalam menganalisis Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau penulis menggunakan teori dalam mengukur kinerja menurut Dwiyanto dalam bukunya Sembiring (2012:98) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas

##### **3.1.1 Produktivitas**

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas layanan. Produktivitas biasanya dipahami sebagai rasio input ke output. Dalam hal ini konsep

peroduktivitas yakni mengukur berapa banyak layanan publik yang dapat memberikan hasil yang diharapkan.

a. Efektivitas Kerja

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ica Laraswari selaku Kepala Bidang politik dan kemasyarakatan pada hari Jumat, 20 Januari 2023 di ruangan Kepala Bidang politik dan kemasyarakatan mengatakan bahwa :

Aparatur sudah bekerja dengan baik yang mana target target yang diberikan dapat dikerjakan. Namun, masih adanya benturan terkait SDM dimana kompetensi yang dimiliki aparatur kita masih kurang atau biasa-biasa saja sementara kita dituntut untuk lebih kreatif dan aparatur kita belum ada yang mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sehingga masih belajar sendiri atau otodidak. Dan juga peralatan yang masih menggunakan peralatan seadanya dan terbatas sehingga hasil yang diinginkan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan magang, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa Kinerja badan kesatuan bangsa dan politik masih belum bekerja secara efektif karena masih adanya masyarakat yang kurang paham tentang pendidikan politik ada di zaman sekarang ini yang menghambat kinerja aparatur itu sendiri seperti kurangnya kompetensi atau keahlian yang dimiliki Aparatur dan juga terbatasnya peralatan yang ada serta masih adanya program sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dimengerti oleh masyarakat itu sendiri

b. Efisiensi Kerja

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ica Laraswari selaku Kepala Bidang politik dan kemasyarakatan hari Kamis, 19 Januari 2023 di ruangan Kepala Bidang politik dan kemasyarakatan mengatakan bahwa :

Kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ini bisa dikatakan belum efisien karena setiap program sosialisasi yang diberikan terkadang tidak selesai tepat pada waktunya. Seperti yang terjadi untuk mendata masyarakat yang masih belum paham apa itu pendidikan politik yang mendasar terhadap tingkat pendidikan politik yang terjadi di Kota Tanjung Pinang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Kota Tanjung Pinang belum bekerja secara efisien karena masih belum dapat menjangkau beberapa wilayah dan terobosan yang masih cenderung itu saja dalam setiap proses tahap sosialisasi

c. Hasil Kerja (Output)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudi S.Sos, M.H selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung dalam hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 16 Januari 2023 di ruangan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan kesatuan bangsa dan politik Kota Tanjung Pinang terus berbenah selama masa pandemi Covid-19 khususnya dalam hal

pendidikan politik sudah berjalan dengan sesuai yang apa yang di harapkan oleh bakesbangpol kota tanjung pinang dan juga masyarakat kota tanjung pinang karena pemerintah Kota tanjung pinang memiliki target untuk membangun Kota tanjung pinang sehingga siap untuk bangkit setelah terdampak Covid. Hal ini kita bisa lihat dari adanya sosialisasi besar besaran yang di gencarkan oleh bakesbangpol kota tanjung pinang sehingga tingkat pendidikan yang baik akan terselenggara di kota tanjung pinang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa, hasil (output) kinerja dari badan kesatuan bangsa dan politik kota tanjung pinang sudah cukup baik dilihat dari adanya hasil kerja yaitu sosialisasi yang terlaksana pada dimasa pandemi Covid-19. Ditambah lagi banyaknya terobosan terobosan baru yang di gencarkan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam beberapa tahun kebelakangan ini

### **3.1.2 Kualitas Layanan**

Kepuasan publik dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengevaluasi kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan komunitas sebagai indikator kinerja adalah informasi tentang kepuasan komunitas biasanya dapat diperoleh dengan mudah.

#### **A. Pemberian Pelayanan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis Anung Tri Saputra S.T selaku Sekretaris Badan kesbangpol pada hari Rabu, 18 Januari 2023 di ruangan Sekretaris Badan kesbangpol mengatakan bahwa :

Dalam pemberian pelayanan kami sudah melaksanakan dengan terobosan terbaru untuk mengedukasi terhadap pendidikan politik , tapi kalau masyarakat masih kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kami itu wajar, karena memang kinerja dalam meningkatkan pendidikan politik ini secara luas dan merata memang lah tidak mudah untuk memberi wawasan kepada seluruh masyarakat yang ingin dan tidak ada kepedulian sama sekali dengan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan layanan terhadap masyarakat sudah dijalankan dengan baik, meskipun sebenarnya belum ada kata puas karena sosialisasi untuk meningkatkan pendidikan politik harus ditingkatkan. Namun, badan kesatuan bangsa dan politik sudah memberikan yang terbaik.

#### **B. Mutu Pelayanan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh Bapak Samsudi S.Sos, M.H selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang dalam hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 16 Januari 2023 di ruangan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan politik Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa:

Badan kesatuan bangsa dan politik kota tanjung pinang selalu memperhatikan mutu nya di setiap pemberian penagarahan sosialisai yang dilakukan . Kami selalu up to date terkait hal hal apasaja yang dapat diakses mayarakat dan dengan mudah mendapatkan gambaran mengenai penting nya pendidikan politik mendasar bagi mayarakat yang belum sama sekali tidak tau apa itu politik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa Kinerja dari bakesbangpol kota tanjung pinang sudah memberikan mutu pelayanan yang baik dengan memberikansosialisai yang baik dalam setiap kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat walaupun dengan kurang maksimal dikarenakan anggaran yang minim.

### **3.1.3 Responsivitas**

Responsivitas di sini mengacu pada konsistensi antara rencana dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### **a. Kemampuan Organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anung TriSaputra S.T selaku Sekretaris Badan kesatuan bangsa dan politik pada hari Selasa, 17 Januari 2023 di ruangan Sekretaris Badan kesatuan bangsa dan politik mengatakan bahwa :

Kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah baik karena badan kesatuan bangsa dan politik telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan menerima masukan juga berusaha memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bakesbangpol kota tanjung pinang dalam memberikan respon kepada masyarakat sudah baik, bakesbangpol kota tanjung pinang belum sudah mampu memberikan yang terbaik

#### **b. Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudi S.Sos, M.H selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung dalam hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 16 Januari 2023 di ruangan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan politik belum baik karena kurangnya kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik, banyak yang masih mementingkan keperluan dan prioritas pribadi dan masih belum sadar akan pentingnya politik pada saat ini

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang belum mampu mengenali kebutuhan masyarakat setempat, masih banyak masyarakat yang kurang tertarik dengan ajakan pemerintah setempat khusus nyan badan kesatuan bangsa dan politik dalam meningkatkan pendidikan politik di kota tanjung pinang

### **3.1.4 Responsibilitas**

Responsibilitas menunjukkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi dan rencana yang ada, serta sesuai dengan prinsip kebijakan yang telah ditentukan.

#### **a. Ketepatan Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudi S.Sos, M.H selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung dalam hasil wawancara yang dilakukan pada hari

Senin, 16 Januari 2023 di ruangan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung mengatakan bahwa:

Semua pekerjaan yang dilakukan Aparatur Dinas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah melaksanakan pekerjaan sesuai prosedurprinsip yang telah di rancang dan diatur, dan semuanya berjalan dengan baik, kegiatan itu sudah menjadi tanggung jawab kami dalam melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.

b. Kebijakan organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudi S.Sos, M.H selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung dalam hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 16 Januari 2023 di ruangan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung mengatakan bahwa :

Mengenai kebijakan yang memang dari dulu sudah di tetapkan dan juga sudah terprogram tentu nya kebijakan yang telha di buat oleh pemereintah sendiri dan juga sudah dilaksanakan beberapa program yang telah kita sepakati dan untuk kepentingan bersama nanti nya juga akan berdampak kepada baik nya maupun buruk nya dalam menunjang kepada tingkat kepuasan masyarakat kepada palayan yang kita berikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan daripenulis, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan program badankesatuan bangsa dan politik masih kurang baik, hal ini karena dari program masih banyak program yang belum terlaksana dengan baik dan masih adakegiatan dan program-program sosialisasi yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur atau aturan yang ada sehingga tidak terlaksananya kegiatan secara maksimal. Adanya pandemi Covid juga menjadi salah satu kendala program yang diakukan badan kesbangpol kotatanjung pinang.

**3.1.5 Akuntabilitas**

Akuntabilitas kinerja organisasi publik merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Hal ini digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam konsisten dengan keinginan masyarakat.

a. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ica Laraswari selaku Kepala Bidang politik dan kemasyarakatan pada hari Jumat, 20 Januari 2023 di ruangan Kepala Bidang politik dan kemasyarakatan mengatakan bahwa :

Dalam kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah dibuat. Untuk hasilnya nanti akan diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di program sosialisasi dan pengenalan pemahaman yang luasa terhadap pemahaman kepada masyarakat tentang penting nya pendidikan politik .

b. Kepekaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Samsudi S.Sos, M.H selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang dalam hasil wawancara yang dilakukan



pada hari Senin, 16 Januari 2023 di ruangan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa :

Kepekaan organisasi sangat lah penting karna untuk mengukursejauh mana pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum sama sekali tidak mengenal arti mendsara dari pendidikan politik, percuma pemerintah memberikan program program sosialisasi terobosan terobosan mengenai politik mendasara yang di rangkum secara sederhana agar mudah dimengerti oleh masyarakat itu sendiri namu di sisi lain masyrakat seperti acuh tidak acuh dengan yang kita berikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah baik dengan menerapkan laporan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

### **3.2 Faktor yang menjadi pendukung atau penghambat Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan pendidikan politik**

Faktor pendukung adalah motivasi kerja yang sangat tinggi dari aparatur dan lingkungan kerja yang ada di badan kesatuan bangsa dan politik antar sesama pegawai nya saling berinteraksi dengan baik dan saling membantu dalam setiap kendala yang ada di lapangan. faktor penghambat adalah kurangnya fasilitas kerja aparatur , kurangnya keahlian atau kemampuan yang dimiliki aparatur, dan kurangnya partisipasi masyarakat

### **3.3 Upaya yang dilakukan oleh Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk menghadapi hambatan yang ada yaitu**

Upaya internal adalah menambah fasilitas kerja dengan cara mengajukan perencanaan anggaran kepada pemerintah kota tanjung pinang dan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur diberikan kesempatan izin belajar .upaya eksternal adalah mengajak masyarakat untuk mendukung program pendidikan pemerintah dan memberikan program sosialisasi khusus nya pendidikan politik

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penyebab kinerja aparatur yang masih rendah yakni masih rendahnya akuntabilitas kinerja, masih rendahnya pelayanan atas pendidikan politik masyarakat, masih kurangnya koordinasi dalam rangka mensosialisasi kan kegiatan kegiatan politik, lemahnya penanaman nilai nilai ideologi bangsa. Hal ini terjadi karena kurangnya manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparasidan akuntabel, belum meratanya informasi terkait sosialisasi politik, kurangnya deteksi dini dalam penanganan pendidikan politik masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang toleransi, solidaritas, dan kerukunan

## **IV. Kesimpulan**

1. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang masih belum optimal hal ini tampak dari : tingkat produktivitas aparatur masih belum bekerja dengan efektif dan efisien dimana masih kurang nya keahlian yang dimiliki aparatur

dan sarana prasarana yang menunjang kinerja aparatur. Kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah dijalankan dengan baik, Responsivitas sendiri dari kinerja kesbangpol belum mampu mengenali kebutuhan masyarakat setempat, Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah baik dengan menerapkan laporan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Segi responabilitas oleh badan kesatuan bangsa dan politik masih kurang baik,

2. Faktor pendukung adalah motivasi kerja yang sangat tinggi, lingkungan kerja yang ada di badan kesatuan bangsa dan politik antar sesama pegawai nya saling berinteraksi dengan baik. Faktor penghambat adalah kurangnya fasilitas kerja aparatur, kurangnya keahlian atau kemampuan yang dimiliki aparatur , kurangnya partisipasi masyarakat .
3. Upaya yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik untuk menghadapi hambatan yang ada yaitu : upaya internal adalah menambah fasilitas kerja, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur upaya eksternal adalah mengajak masyarakat untuk mendukung program, memberikan program sosialisasi khususnya pendidikan politik

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjung Pinang dalam meningkatkan pendidikan politik

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Badan kesatuan bangsa dan politik kota tanjung pinang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. Daftar Pustaka

### A. Buku Referensi

- Affandi, Idrus. 2021. *Pendidikan Politik Kepemimpinan dan Kepeloporan*. BANDUNG: PT Remaja Rosdakarya
- Almond, Gabriel A.1960. *The Politics of the Developing Areas*. Princeton: Princeton University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Babbie, Earl. 2010. *The Practice Of Social Research*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- ,2008. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. GramediaPustaka. Eko Handoyo, dan Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta.Penerbit Pohon Cahaya.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo. Ismawan, Indra. 1999. *Money politics : pengaruh uang dalam pemilu*. Yogyakarta:Media Pressindo.

Kartasapoetra, Misdyanti dan. 1993. *Fungsi Pemerintahan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju.

Moelong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif ( Edisi Revisi)*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2011, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nur Indrianto, dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF

Nur Khoiran, M. 1999 *Pendidikan Politik bagiwarga negara*. Yogyakarta: LKIS

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta Rajawali Pers.

Simangunsong, Femandes. 2017. *Metedologi Penelitian Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2009. *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramian. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo. Syafie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

## **B. Jurnal atau Skripsi**

Hidayat, Rahmat. 2021. “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2018”

Deswanda, Iko. 2018. “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas Dan Berintegritas Tahun 2018” Julyara, Azfina. 2015”

Julyara, Azfina. 2015. “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau 2018”